**Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap)**

**Pada Laporan Keuangan Koperasi Satuan**

**Brimob Polda Kalimantan Timur**

# Sugeng1, Iskandar2

1Jurusan Akuntansi, Universitas Mulawarman. Jalan Tanah Grogot No.1, Samarinda, Kalimantan Timur 75119, Indonesia.

\*Korespondensi Penulis.

E-mail: waletsugeng27@gmail.com

2E-mail: irwansyah@feb.unmul.ac.id

**ABSTRAK**

Sugeng. **Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur**.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) pada laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur di Balikpapan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah komparatif yaitu membandingkan laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) sudah sesuai atau belum sesuai*.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur diketahui bahwa laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur belum sesuai dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP). Dimana komponen laporan keuangan hanya terdiri 2 komponen meliputi Neraca dan Laba Rugi dan tidak terdapat 3 komponen meliputi Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Elemen neraca hanya terdiri 6 pos yaitu Kas dan setara kas, Piutang usaha dan piutang lainnya, Persediaan, Aset tetap, Utang usaha dan utang lainnya dan Ekuitas, sehingga kurang 4 pos. Begitupula elemen Laba Rugi hanya terdiri 2 pos yaitu Pendapatan dan Beban keuangan sehingga kurang 3 komponen. Namun pada elemen pengakuan dan pengukuran sudah sesuai SAK ETAP menggunakan basis akrual dan biaya historis.

**Kata Kunci : SAK ETAP, Koperasi.**

**ABSTRACT**

Sugeng. **Analysis of the Application of Financial Accounting Standards for Entities without Accountability in the Financial Statements of the East Kalimantan Regional Police Mobile Brigade Cooperative**.

The purpose of this study was to know and analyze the application of the Financial Accounting Standards for Entities without Accountability in the financial statements of the East Kalimantan Police Mobile Brigade Cooperative Unit. Type research was used qualitative research. The source of data in this study is secondary data obtained from the East Kalimantan Police Mobile Brigade Cooperative in Balikpapan. The analytical tool used in this research is comparative, which is to compare the financial statements of the East Kalimantan Police Mobile Brigade Cooperative with the Financial Accounting Standards for Entities without Accountability that are appropriate or not. The results showed that the financial statements of the East Kalimantan Police Mobile Brigade Cooperative Unit showed that the financial statements of the East Kalimantan Police Mobile Brigade Cooperative were not in accordance with the implementation of the Financial Accounting Standards for Entities without Accountability. Where the components of the financial statements only consist of 2 components including the balance sheet and profit and loss and there are no 3 components including changes in equity, cash flow statements and notes to financial statements. Balance sheet elements only consist of 6 items, namely cash and cash equivalents, trade and other receivables, inventories, fixed assets, accounts payable and other payables and equity, so there are 4 less items. Likewise, the Profit and Loss element only consists of 2 items, namely income and financial expenses, so there are less 3 components. However, the recognition and measurement elements are in accordance with Financial Accounting Standards for Entities without Accountability using accrual basis and historical cost.

**Keywords: Financial Accounting Standards Entities Without Accountability, Cooperatives.**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Perusahaan maupun koperasi di era yang memasuki globalisasi sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup usahanya untuk dapat bersaing dengan perusahaan sejenis dan tantangan dunia bisnis. Indonesia memiliki koperasi dengan landasan hukum dengan diakuinya koperasi merupak satu diantara bentuk organisasi yang turut aktif dalam perekonomian rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian pada pasal 1 ayat 1, dijelaskan koperasi yang ada di Indonesia sebagai badan usaha dalam bentuk kelompok dengan anggota individu berlandaskan badan hukum yang mana aktivitasnya sesuai dengan prinsip perkoperasian, dimana koperasi ini menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat dengan asas bersifat kekeluargaan.

**Rumusan Masalah**

 Berdasarkan pada permasalah diatas maka pertanyaan yakni bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) pada laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2018 dan 2019?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Melalui uraian sebelumnya maka tujuan dari pelaksanaan penelitian yakni untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) pada laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2018 dan 2019.

**1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dengan dilaksanakan penelitian ini berupa :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis dimanfaatkan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) pada laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur.

1. Manfaat praktis

Bagi Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur, hasil sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan usaha sehingga tercapainya suatu tujuan telah ditetapkan suatu koperasi berupa anggota sejahtera dalam kehidupannya.

**METODE PENELITIAN**

**3.1. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penerapan prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur disusunnya pelaporan keuangan koperasi sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus terhadap anggotanya, dengan indikator :

1. Akuntansi perkoperasian merupakan sistem pelaporan data keuangan untuk koperasi terdapat catatan, klasifikasi dan penafsiran.
2. SAK ETAP merupakan pedoman pembuatan pelaporan data keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publiknya.
3. Pengakuan adalah diungkapnya pelaporan data keuangan bersifat komparatif tiap periode meliputi pemberian data keuangan melalui dasar akrual meliputi aktiva, hutang dan ekuitas, penghasilan dan beban serta laba rugi berlandaskan SAK ETAP.
4. Pengukuran adalah ditetapkannya jumlah dana dipergunakan entitas dalam pengukuran aktiva, hutang, pendapatan dan biaya dengan dasar diukurnya berupa biaya historis serta nilai wajar.
5. Penyajian adalah disajikannya data keuangan untuk entitas dengan wajar termasuk dibuat pernyataan eksplisit pada catatannya.
6. Pengungkapan adalah sebagai dasar diukurnya data keuangan tersusun dalam pemahaman yang mendukung pos-pos dalam laporan keuangan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

* 1. **Gambaran Umum Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur**

Gambaran umum Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dijelasakan sebagai berikut:

**4.1.1. Bidang Organisasi**

1. **Keanggotaan**

Keanggotaan Primkoppol Satbrimob Polda Kaltim pada dasarnya diberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota. Dengan kata lain anggota yang masuk sebagai anggota Koperasi adalah sukarela (demokratis) tanpa ada tekanan dan paksaan. Untuk itu keanggotaan Primkoppol Satbrimob Polda Kaltim adalah Polri, PNS, PHL, yang ada dilingkungan Satuan Brimob Kepolisian Daerah Kaltim baik yang masih aktif maupun yang sudah MPP. Anggota Koperasi pada tahun buku 2018 sejumlah 540 orang dan tahun buku 2019 berjumlah 518 orang berarti turun sebanyak 22 orang.

**Pembahasan**

Melalui perolehan penelitian tentang penerapan SAK ETAP untuk laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur diketahui bahwa terdapat pelaporan data keuangannya dimana belum memenuhi standar untuk SAK ETAP tahun 2009.

1. Komponen Laporan Keuangan

Untuk SAK ETAP tahun 2009 memiliki aturan untuk diimplementasikan berupa panduan disusunnya laporan keuangan. Dimana dalam neraca terdapat dipisahkannya suatu aset terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar, begitupula hutang atau kewajiban meliputi jangka pendek dan panjang. Untuk pengakuan biaya terjadi berdasarkan dampak langsung adanya pengakuan aktiva dan pengakuan kewajiban dilaporan laba/rugi. SAK ETAP menyarankan laporan keuangan perlu lengkap terdiri mulai dari neraca, laporan laba/rugi, perubahan ekuitas, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Namun penelitian yang diperoleh menyiratkan bahwa elemen dilaporan keuangannya Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur hanya terdiri 2 komponen meliputi Neraca dan Laba/Rugi sedangkan untuk SAK ETAP terdapat 5 komponen yaitu Neraca, Laba Rugi, Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tidak terdapat 3 komponen meliputi Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Maka Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur terdapat laporan belum sesuai SAK-ETAP dilihat dari elemennya.

Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur mencatat transaksi keuangan secara rutin setiap bulannya dan dibukukan berbentuk laporan keuangan pada laporan RAT setiap tahunnya, dan koperasi ini memiliki banyak unit usaha jadi di setiap unit usahanya terdapat penanggungjawab melaporkan tentang keuangan kepada bendahara koperasi untuk dibuat laporan keuangan secara *global* atau keseluruhan yakni bendahara dari setiap unit usaha. Penyusunan laporan keuangannya oleh dua orang yang bertanggung jawab sebagai bendahara I dan bendahara II, hal ini digunakan untuk melihat posisi keuangan, kas masuk/keluar maupun apa saja pengeluaran yang dilakukan dan mengontrol pengeluaran kas yang terjadi. Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur memiliki keterbatasan SDM yang mengerti serta dapat membuat pelaporan keuangannya sesuai SAK-ETAP membuat diterapkannya hal tersebut masih terbatas.

SAK-ETAP dijelaskan pelaporan keuangannya terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, perubahan ekuitas, arus kas maupun catatan atas laporan keuangan tentang rangkuman informasi mengenai akuntansi. Sedangkan pelaporan keuangannya pada Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur, yang disajikan yaitu Neraca dan Laporan Laba/Rugi atau di koperasi lebih dikenal dengan Laporan Perubahan Hasil Usaha.

Untuk transaksi di koperasi yang suatu kondisi belum ada pengaturan spesifik berlandaskan SAK-ETAP, memerlukan manajemen koperasi untuk penggunaan *judgement* agar dapat terjadi pengembangan dan penerapan kebijakan dalam akuntansi supaya dihasilkan informasi relevan untuk pengguna laporan tersebut. Dari itu perlunya pembuatan pelaporan keuangan dengan penyajiannya jujur pada posisi keuangan, menyajikan kinerja keuangan termasuk arus kas. Selain itu, perlu netral berupa bebas dari bias, dapat tercermin kehati-hatian maupun lengkap untuk tiap elemen.

1. Pengakuan

Dilihat dari elemen pengakuan diketahui laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur menggunakan basis akrual yang mana pencatatan pemasukan dan beban untuk periode saat terjadinya suatu transaksi, bukan pencatatan laporan keuangan saat pendapatan diterima ataupun dibayarkan. Sehingga pelaporan keuangannya Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sudah sesuai SAK-ETAP dengan pengakuan berdasarkan basis akrual.

SAK-ETAP 2.33 dijelaskan tiap entitas wajib melakukan penyusunan pelaporan keuangan terkecuali pelaporan arus kas berlandaskan akrual. Tiap dasar akrual diketahui pengakuan pos merupakan aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan beban yang terwujudnya pengertian dan kriteria pengakuan tiap pos. Nomor 2.34 dijelaskan pengakuan aktiva pada neraca dimungkinkan terdapat kemanfaatan ekonomi pada waktu akan datang dapat adanya pengaliran menuju entitas dan aktiva tersebut perlu terdapat nilai maupun biaya dengan pengukuran yang handal. Aktiva tidak terjadi pengakuan dineraca apabila dilakukan pengeluaran namun kemanfaatan ekonomi tidak tertuju pada entitas untuk tahun terkait. Alternatifnya menyebabkan adanya pengakuan pada beban di laba/rugi.

SAK-ETAP 2.35 dijelaskan pengakuan hutang pada neraca dengan adanya dimungkinkan terjadi pengeluaran sumberdaya memiliki kemanfaatan ekonomi berupa penyelesaian hutang saat ini dengan nilai yang pengukurannya secara handal. Nomor 2.36 berupa pendapatan yang diakui sebagai dampak langsung dengan diakuinya aktiva dan hutang. Pengakuan pendapatan pada pelaporan laba/rugi dengan peningkatan kemanfaatan ekonomi diwaktu akan datang terkait terjadinya kenaikan aktiva maupun turunnya hutang dengan pengukuran dilakukan secara handal. Nomor 2.37 berupa beban diakui sebagai dampak langsung atas dasar diakuinya aktiva dan hutang. Pengakuan beban pada pelaporan laba/rugi yang terjadi turunnya kemanfaatan ekonomi diwaktu akan datang terkait turunnya aktiva dan naiknya hutang yang pengukurannya dilakukan secara handal.

SAK-ETAP 2.38 dijelaskan laba/rugi sebagai varians/selisih pada pendapatan dan biaya yang terpisah pada pelaporan keuangannya dengan prinsip pengakuan terpisah tidak diharuskan. Nomor 2.39 tidak adanya pengizinan untuk pos yang diakui di neraca dengan tidak sesuai pengertian aktiva dan hutang yang terjadinya pengabaian pos-pos menerapkan “*matching concept*”.

1. Pengukuran

Untuk elemen pengukuran diketahui laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur menggunakan biaya historis yaitu untuk aset tidak lancar perlu diukur sebesar beban diperolehnya dan perhitungan akumulasi diukur sesuai tanggal perolehan. Sehingga pelaporan data keuangannya Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur telah sesuai pada SAK ETAP melalui pengukuran menggunakan biaya historis.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1. Kesimpulan**

Dari hasil dan pembahasan mengenai penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2018 dan 2019, ditarik kesimpulan yakni data pelaporan keuangannya yang dibuat Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2018 dan 2019 belum sesuai pada landasan SAK ETAP yakni laporan keuangan hanya terdiri 2 komponen, elemen neraca hanya terdiri 6 pos dan elemen laba/rugi terdiri 2 pos.

**5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan mengenai penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2018 dan 2019, maka disarankan diantaranya :

1. Sebaiknya Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur melakukan pembuatan data keuangan tersusun berlandaskan SAK ETAP seperti memasukkan pajak 15% pada perhitungan SHU, membuat laporan perubahan modal, membuat arus kas serta catatan dari pelaporan data keuangannya sehingga laporan keuangannya dihasilkan lengkap dan mudah dipahami pada pihak terkait.
2. Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur diharapkan melakukan pencatatan secara lengkap mengenai aktivitas operasinya, melakukan siklus akuntansi dengan lengkap dan melakukan klasifikasi pos-pos secara benar untuk mempermudah disusunnya laporan keuangan melalui pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan berlandaskan SAK ETAP.

57

1. Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur diharapkan mampu memiliki SDM yang mengerti serta dapat melaksanakan pembuatan laporan keuangan berlandaskan SAK ETAP agar penerapannya didalam pelaporan keuangan dapat terus berlanjut ke periode-periode berikutnya.
2. Bagi peneliti lain diharapkan melakukan penelitian dengan obyek koperasi lainnya dengan penilaian pelaksanaan SAK ETAP.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andreas, Beth Sianne. 2014. Evaluasi Atas Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Laporan Keuangan Koperasi di Kota Bandar Lampung. Skripsi. Lampung.

Baridwan. 2018. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode. Edisi 5. Yogyakarta : BPPE.

Harahap, Sofyan Syafri. 2017. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Cetakan Kesebelas, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012. Standar Akuntansi Keuangan Jakarta : Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia. (23 Oktober 2010). Exposure Draft Pernyataan.

Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2016. Intermediate Accounting. IFRS Edition. Second Edition. United States: WILEY.

Martini, dkk. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah, buku 1, Salemba Empat, Jakarta.

Meireny. 2015. Analisis penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP (studi kasus pada koperasi Pasar Gondanglegi. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim.

Munawir, S. 2012. Analisis Informasi Keuangan, Liberty, Yogyakarta.

Nurlika, Rima Wahyuni. 2016. Penerapan standar akuntansi keuangan terhadap laporan keuangan Koperasi Karyawan Pembangunan PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim Area Samarinda dilihat dari sisi PSAK No.27 tentang akuntansi perkoperasian yaitu Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha. Accounting Scientific Journal Vol 1 No. 1.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi

Rachmad, Chartady.2018. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian di Koperasi Unit Desa Karya Jaya Kijang. Accounting Scientific Journal Vol 1 No. 1

Reeve, dkk. 2011. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Rudianto. 2010. Akuntansi Koperasi Edisi Kedua. Jakarta. Erlangga.

Sekarwati. 2018. Analisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (sak etap) pada laporan keuangan koperasi karyawan industri kemasan semen gresik (iksg). Jurnal Inovoasi Volume 14 Nomor 1.

Subandi. 2015. Ekonomi Koperasi : Teori dan Praktek. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Tanugraha, Jevon. 2012. Evaluasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada PT. TDMN. Berkala Ilmilah Mahasiswa Akuntansi –Vol.1 No. 3 Mei 2012. Surabaya: Unika Widya Mandala.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian